



Kemerdekaan Harus Dipertahankan

SEJARAH INDONESIA PAKET C
SETARA SMA/MA
KELAS XI

MODUL TEMA 10



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018



Kemerdekaan Harus Dipertahankan

SEJARAH INDONESIA PAKET C
SETARA SMA/MA
KELAS XI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018

- **Penulis:** Sulaiman Hasan
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

iv+ 32 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pengantar Modul	1
Petunjuk Penggunaan Modul.....	2
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	2
UNIT 1 PEMBENTUKAN ARMADA PEMERINTAHAN RI	3
A. Sidang-Sidang PPKI.....	3
B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) .	4
C. Pembentukan Kabinet RI dan Pembagian Wilayah	4
D. Pembentukan Badan-badan Perjuangan dan TNI.....	5
E. Pembentukan Partai Politik	6
F. Perubahan dan Perkembangan Politik	
Pada Awal Kemerdekaan	7
Penugasan	10
Latihan	11
UNIT 2 MELAWAN AGRESI DENGAN DARAH	14
A. Dimulainya Operasi Militer	14
B. Campur Tangan PBB	15
C. Perjanjian Linggajati	16
D. Perjanjian Renville	16
E. Perjanjian Roem-Royen	18
F. Konferensi Meja Bundar (KMB)	18
Penugasan	19
Latihan	20
Rangkuman	23
Uji Kompetensi	25
Kunci Jawaban	28
Kriteria Pindah Modul	31
Daftar Pustaka	32
Profil Penulis	32

KEMERDEKAAN HARUS DIPERTAHANKAN



Pengantar Modul

Setiap 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahun di sekitar bulan Agustus, dalam rangka menyemarakkan hari kemerdekaan Indonesia. Kegiatan apa saja yang sering kamu ikuti dalam rangkaian peringatan hari kemerdekaan tersebut? Mengapa kita harus memperingati hari kemerdekaan? Mengapa bangsa Indonesia harus merdeka? Siapa yang membuat bangsa Indonesia merdeka? Bagaimana makna hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa yang harus kita lakukan di masa kemerdekaan ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pantas kita ajukan untuk menemukan jawaban yang lebih jelas. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan adalah keinginan seluruh bangsa di dunia. Kemerdekaan menjadi modal dasar pembangunan di berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas menentukan nasib sendiri. Hidup merdeka tentukan membuat kita lebih leluasa menentukan arah dan jalan pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga memberikan keberpihakan pembangunan kepada bangsa sendiri. Kamu tentu masih ingat bahwa penjajah hanya mementingkan kesejahteraan mereka sendiri. Penjajahan dimanapunakan selalu menguras sumber daya negeri yang terjajah dan menambah kejayaan negeri penjajah. Karena itu, kewajiban kita mensyukuri kemerdekaan dengan mengisinya melalui pembangunan nasional. Kemerdekaan juga bukan merupakan hadiah penjajah. Bangsa Indonesia berjuang melalui berbagai cara dan berbagai pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Ribuan pejuang gugur sebagai kusuma bangsa, tidak terhitung kerugian harta benda untuk meraih kemerdekaan Indonesia.

Masihkah ada ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia sekarang? Tentu saja ada, karena itu mari kita telaah lebih lanjut hakikat kemerdekaan bangsa Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menjaganya!



Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang disusun secara berurutan mulai dari unit 1 sampai dengan unit 2. Pembahasan setiap unit merupakan satu kesatuan untuk dapat memahami modul secara baik. Anda perlu mengikuti petunjuk berikut untuk membaca modul.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.
2. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
5. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.
6. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.
7. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
8. Selamat membaca dan mempelajari modul



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hasil sidang PPKI pertama
2. Menjelaskan proses pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia
3. Mendeskripsikan perubahan politik pada awal kemerdekaan
4. Menjelaskan makna penting pembentukan pemerintahan pertama bagi kehidupan bangsa Indonesia
5. Menyajikan karya tulis hasil analisis tentang proses pembentukan lembaga negara
6. Menyajikan karya tulis hasil analisis tentang makna pembentukan lembaga negara bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini
7. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu melalui peperangan
8. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda melalui peperangan
9. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan melalui diplomasi
10. Menyajikan karya tulis hasil identifikasi tentang perlawanan rakyat di salah satu daerah di Indonesia
11. Menyajikan karya tulis hasil identifikasi tentang dampak dari perlawanan rakyat di salah satu daerah di Indonesia bagi perjuangan diplomasi Internasional untuk memperoleh pengakuan kedaulatan

UNIT 1

PEMBENTUKAN ARMADA PEMERINTAHAN RI

Untuk menjalankan roda pemerintahan maka dibentuklah kelembagaan negara agar pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk antara lain sebagai berikut;



A. Sidang-Sidang PPKI

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai badan politik satu-satunya segera mengambil prakarsa dan tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu, PPKI berhasil menetapkan 3 keputusan penting, yaitu :

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI.
Ketika masih berupa RUUD, dilakukan beberapa perubahan atas usul Drs. Moh. Hatta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain : rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya mengambil dari isi Piagam Jakarta yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bab III, Pasal 6, UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.
2. Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden (atas usulan Otto Iskandardinata)
3. Membentuk suatu Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR/DPR terbentuk. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Achmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panitia Kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, bukan personalianya. Rapat Panitia Kecil tersebut dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Dalam sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya yaitu :
 - 1) Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden
 - 2) Membagi wilayah RI ke dalam 8 propinsi serta menunjuk para gubernurnya
 - 3) Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR)
 Selanjutnya pada sidangnya yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, berhasil ditetapkan keputusan, yaitu :

- 1) Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta.
- 2) KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai Pusat DPR sebelum Pemilu diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
- 3) PNI dirancang menjadi partai tunggal di Indonesia, (namun akhirnya dibatalkan)
- 4) Membentuk Badan Keamanan Rakyat. BKR ini berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa alat-alat kelengkapan negara RI terdiri atas lembaga tinggi (Presiden, MA, DPR, DPA, BPK) dan lembaga tertinggi negara (MPR). Sementara MPR yang harus dibentuk melalui pemilu belum terbentuk, maka PPKI dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan akan membentuk Komite Nasional dengan tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP pertama dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam sidangnya, dikeluarkan dua keputusan yaitu :

- 1) Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dengan jumlah anggota 15 orang,
- 2) Mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR/MPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Dalam perkembangan berikutnya, BP-KNIP dikuasai oleh golongan sosialis pimpinan Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin. Golongan ini mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan dibentuknya partai-partai politik. Sebab bila hanya satu partai politik saja dikhawatirkan muncul anggapan dari negara-negara Barat (Sekutu) bahwa Indonesia negara fasis, bukan negara demokrasi. Usul tersebut kemudian ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik

C. Pembentukan Kabinet RI dan Pembagian Wilayah

Sebagai realisasi hasil keputusan PPKI (19 Agustus 1945) tentang pembentukan 12 kementerian dan pembagian wilayah RI ke dalam delapan provinsi, maka pada tanggal 2 September 1945, dibentuklah Kabinet RI pertama dan 8 provinsi. Kabinet RI pertama ini merupakan Kabinet Presiden I berdasarkan UUD 1945. Susunan Kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 departemen dan 4 menteri negara. Adapun 8 provinsi beserta Gubernurnya yaitu:

Tabel delapan provinsi beserta gubernurnya

No	Propinsi	Gubernur
1	Sumatera	Mr. Teungku Mohammad Hassan
2	Jawa Barat	Soetardjo Kartohadikusumo
3	Jawa Tengah	Rd. Panji Suroso
4	Jawa Timur	R.A. Soeryo
5	Sunda Kecil	I Gus Ketut Pudja J.
6	Maluku	Latoeharhary G.S.J.
7	Sulawesi	Ratulangi
8	Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Noer

Dengan dilakukannya pembagian wilayah ke dalam delapan provinsi disertai para gubernurnya merupakan keputusan politik yang amat penting bagi penataan negara dan pemerintahan Indonesia yang mempunyai wilayah cukup luas. Dengan demikian, upaya membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilaksanakan. Hal ini terbukti ketika bangsa Indonesia menghadapi kedatangan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang bermaksud menjajah kembali, dengan adanya para gubernur sebagai pemimpin tertinggi di daerah-daerah maka pertahanan keamanan di seluruh daerah Indonesia menjadi kuat.

D. Pembentukan Badan-badan Perjuangan dan TNI

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pemerintah menegaskan bahwa BKR selain berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang juga sebagai induk organisasi untuk memelihara keselamatan rakyat. Anggota BKR terdiri dari bekas anggota Peta, Heiho, Keibodan, Seinendan dan KNIL. Untuk mengkoordinir BKR di daerah, maka bekas anggota Peta di Jakarta membentuk BKR Pusat dengan susunan pengurusnya :

Ketua Umum : Kaprawi (eks daidanco Sukabumi)

Ketua I : Sutalaksana

Ketua II : Latif Hendraningrat

BKR Pusat segera menjalin hubungan dengan BKR-BKR daerah seperti BKR Jawa Barat (Arudji Kartawinata), Jawa Tengah (Soedirman), dan Jawa Timur (drg. Mustopo). Pembentukan BKR ternyata menimbulkan kekecewaan sebagian para pemuda yang menginginkan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi keinginan para pemuda tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan agar tidak memancing dan membangkitkan permusuhan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Karena ditolak, akhirnya para pemuda

seper Soekarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, dll. mendirikan badan perjuangan sendiri yang disebut Komite van Aksi yang bermarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Adapun laskar-laskar pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi di antaranya : Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Banteng, Hizbullah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia. Selain itu ada kesatuan-kesatuan khusus yang dekat hubungannya dengan BKR, seper Tentara Pelajar, dan Tentara Genie Pelajar.

Gerakan pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka pembentukan TNI yang juga didorong oleh situasi dan kondisi yang berat pada waktu itu, karena kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA. Pada bulan September sampai Desember 1945, merupakan masa-masa pertempuran sengit yang terjadi di kota-kota besar Indonesia dalam menghadapi NICA yang dibantu pasukan Inggris yang berencana menguasai kembali Indonesia. Menghadapi situasi yang kritis, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Kepala Staf Umumnya Letkol Oerip Soemohardjo. Oerip Soemohardjo terkenal dengan ucapannya, yaitu "Aneh suatu negara zonder tentara" (zonder = tanpa).

Sampai sekarang tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai Hari TNI atau Hari Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 12 November 1945, pemerintah mengangkat Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TKR. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, dan tanggal 3 Juni diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Sekelompok Tentara Keamanan Rakyat dan Panglima Besar TKR, Jendral Soedirman.

Pada dasarnya, proses terbentuknya TNI berasal dari perjuangan rakyat. TNI lahir dan berkembang bersama rakyat. TNI merupakan wadah perjuangan dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik), TNI senan asa bahu membahu bersama rakyat untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

E. Pembentukan Partai Politik

Sejalan dengan perkembangan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan, maka sistem kepartaian pun mengalami perubahan. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI hanya mengakui satu partai politik yang berlaku di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, tokoh-tokoh bangsa Indonesia merasa tidak puas dan menganggap sudah saatnya membentuk beberapa partai politik. Akibat desakan itulah, berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tang-

gal 3 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai-partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat Indonesia. Maklumat tersebut mendapat sambutan dari tokoh-tokoh partai politik.

Adapun nama-nama partai politik yang dibentuk diantaranya Partai nasional Indonesia (PNI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) Majelis Syura Moeslimin Indonesia (Masyumi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Perkembangan partai politik menyebabkan timbulnya keberagaman ideologi yang berpengaruh terhadap kehidupan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberagaman ideologi politik tersebut disebabkan setiap partai politik menggunakan asas dan ideologi politik yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, jumlah partai politik di Indonesia terus bertambah. Mereka selalu bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat. Bahkan, diantara partai politik itu ada yang dijadikan alat oleh kaum politisi untuk berebut kursi dan jabatan dalam pemerintahan. Terjadilah pertentangan di antara partai-partai politik sehingga mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam suasana yang penuh pertentangan politik, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP (parlemen) bukan kepada presiden. Pemerintah ternyata menyetujui usul tersebut sehingga terbentuklah Kabinet Parlemerter pada 14 November 1945. Soetan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syahrir.

Pembentukan Kabinet Syahrir yang bersifat parlemerter itu merupakan penyimpangan pertama kali pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen (KNIP). Padahal, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan harus dijalankan menurut sistem Kabinet Presidensial. Dalam kenyataannya, kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing memperebutkan pengaruh dan kedudukan. Akibatnya, kabinet selalu berganti-ganti karena dijatuhkan oleh parlemen.



F. Perubahan dan Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan bertujuan agar dapat mengakomodasi suara-suara rakyat yang nantinya berguna bagi pemerintahan. tentunya partai-partai tersebut memiliki pergerakan yang berbeda satu sama lainnya. Salah satunya yaitu PNI yang merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia serta Gabungan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kemunculan dari partai-partai yang memiliki haluan sosialis-komunis menjadi awal dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Setelah peristiwa Proklamasi yang menjadi pertanda Kemerdekaan Indonesia, tentu saja banyak perubahan dan perkembangan yang terjadpada politik Indonesia. Namun meskipun begi-

tu, kondisi politik belum juga stabil di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari politik serta pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah:

1. Faktor Internal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia;

Persaingan diantara partai politik yang satu dengan lainnya, terutama dalam hal perbedaan ideologi. Sehingga menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam pemerintahan Indonesia. Gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri. Negara Indonesia masih mencari permasalahan hukum di Indonesia mana yang sering diterapkan dalam pemerintahan sehingga seringkali mengalami perubahan sistem.

2. Faktor Eksternal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia;

Datangnya bangsa Inggris yang berbarengan dengan NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa peperangan di beberapa daerah.

Status Jepang yang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu datang ke Indonesia. Nah, berikut ini perjalanan perkembangan politik di Indonesia dari awal kemerdekaan yang berlangsung sampai tahun 1950:

1. Perubahan Sistem Presidensial Ke Parlementer (3 November 1945)

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dimulai saat Maklumat Politik yang dikeluarkan Moh.Hatta pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan antara lain adalah:

- KNIP difungsikan sebagai dewan perwakilan rakyat yang dilakukan sebelum melaksanakan pemilihan umum.
- PNI (Partai Nasional Indonesia) dibentuk sebagai partai tunggal Negara Indonesia, namun akhirnya keputusan ini dibatalkan.
- BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang difungsikan sebagai badan keamanan yang beroperasi di tiap tiap daerah.

Adanya keragaman ideologi yang terbagi ke beberapa golongan mulai dari agama, nasionalis, serta sosialis-komunis yang ada pada awal-awal kemerdekaan Indonesia memiliki implikasi yang cukup signifikan pada struktur pemerintahan dari kepemimpinan negara. Perubahan dari KNIP serta mulai munculnya beragam partai politik di Indonesia. Kedua hal ini menjadi katalisator utama dari perubahan struktur pemerintahan di Indonesia. Naiknya Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri di Indonesia juga menjadi pengaruh yang ikut andil didalam perubahan tersebut.

Lembaga kepresidenan terbentuk pada tanggal 2 September 1945 yang secara langsung dibentuk oleh Presiden Soekarno. Secara langsung presiden membentuk susunan kabinet yang digunakan untuk melaksanakan peran eksekutif yang berasal dari lembaga kepresidenan Indonesia. Hal tersebut menjadi manifestasi untuk menguatkan lembaga kepresidenan

agar dapat lebih mengerjakan tugas-tugas negara dengan maksimal. Susunan kabinet yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945 ini benar-benar mencerminkan keragaman ideologi yang ada di Indonesia. Meskipun parta-partai politik baru bermunculan saat dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, namun keragaman Ideologi sudah menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam lembaga kepresidenan.

2. KNIP dengan Lembaga Pemerintahan (14 Oktober 1945)

Saat sidang pertama KNIP yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 oktober 1945, Sjahrir diamanati sebagai Ketua Badan Pekerja KNIIP. Saat persidangan berlangsung, banyak sekali anggota-anggota di dalamnya yang mengusulkan mengenai perubahan dari fungsi KNIP serta kerja KNIP yang tadinya hanya untuk membantu presiden menjadi sebuah lembaga legislatif. Hal ini semakin didukung dengan terbitnya Maklumat Presiden Nomor X mengenai pemberian kekuasaan legislatif pada badan KNIP. Sehingga KNIP kini memiliki kuasa untuk memberukan usulan kebijakan kepada presiden yang sedang melaksanakan tugas-tugas dari pemerintahan. Selain itu, KNIP juga mulai berposisi seperti Dewan Perwakilan Rakyat dalam sementara waktu hingga dilaksanakan pemilihan umum yang digunakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. Sedangkan untuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) sendiri, memiliki tugas untuk membantu serta mengawasi dari jalannya kinerja pemerintahan pada tataran yang lebih rendah dibandingkan dengan presiden.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara (5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947)

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dilanjutkan dengan pembentukan beragam alat kelengkapan keamanan negara yang ditugaskan untuk mengamankan Bangsa Indonesia. Alat Kelengkapan Keamanan Negara tersebut antara lain adalah:

- TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945
- TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibentuk pada 1 Januari 1946
- TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dibentuk pada 26 Januari 1946
- TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibentuk pada 7 Juni 1947

4. Perpindahan Ibukota Negara (Awal di Tahun 1946)

Sampai pada awal di tahun 1946, kondisi dari ibu kota Negara yaitu Jakarta mengalami kekacauan yang tak kunjung membaik. Banyaknya teror-teror dari bangsa asing yang ingin menguasai pemerintah Indonesia. Sehingga pada 14 Januari 1946, Pemerintah memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta.

5. Politik Luar Negeri (Awal Tahun 1950)

Saat awal-awal kemerdekaan, politik luar negeri Bangsa Indonesia lebih fokus pada bagaimana cara mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 45 disahkan pemerintah. Pada alinea 4 pembukaan UUD tercetus jika “melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian

abadi serta keadilan sosial". Karena itu lah terbentuk politik BEBAS AKTIF yang menyatakan bahwa Indonesia bebas dalam melakukan tindakan dan tidak dipengaruhi oleh negara lainnya serta keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

PENUGASAN

Pada penugasan ini anda diminta untuk membuat dan melengkapi form peta konsep atau diagram konsep tentang pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan.

1. Tujuan

- Melalui penugasan ini diharapkan Anda mampu memahami dan mendeskripsikan proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia serta mampu mengidentifikasi dukungan dan pembentukan lembaga pemerintahan di berbagai daerah terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

2. Media

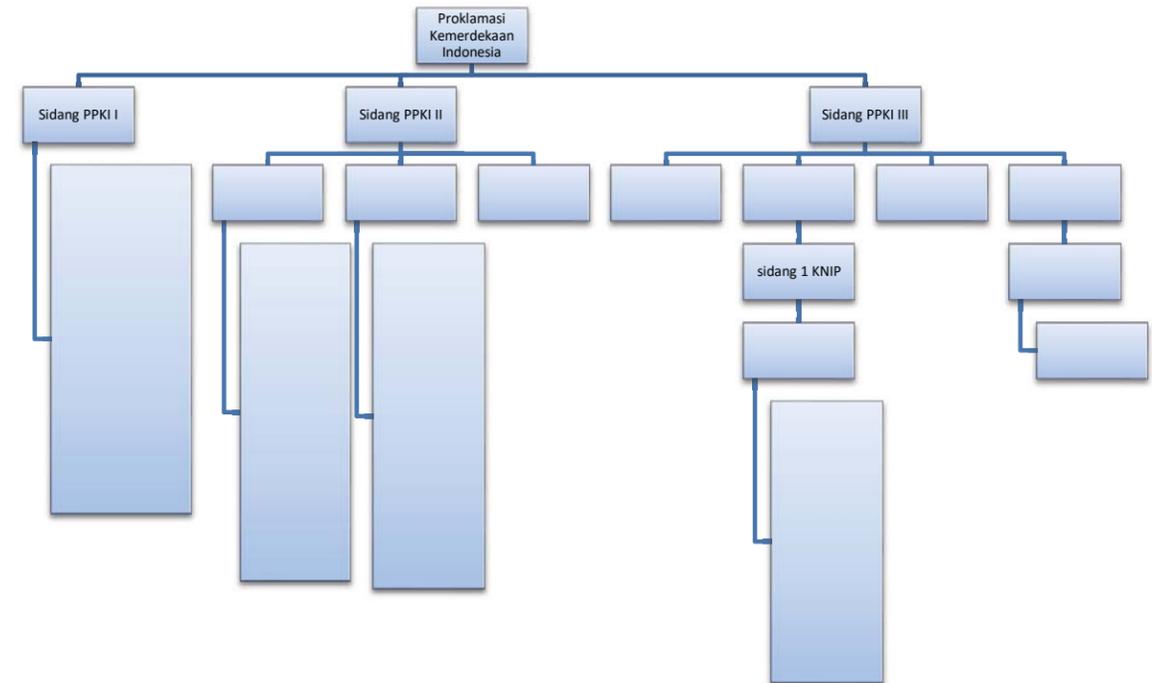
Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

- Sumber belajar seperti buku ataupun data artikel internet dari sumber yang kredibel
- Buku catatan dan alat tulis serta penggaris
- Komputer atau laptop (jika ada)

3. Langkah-langkah Kegiatan

Selanjutnya Anda mengerjakan tugas dengan mengikuti langkah-langkah penugasan berikut:

- Carilah sumber belajar tentang pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan.
- Baca, analisis dan identifikasikan proses pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan.
- Tuangkanlah hasil identifikasi Anda dalam peta konsep berikut :



- Presentasikanlah hasil penugasan Anda di depan kelas

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e.

- Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal berikut ini, salah satunya adalah ...
 - Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
 - Pemilihan anggota MPRS dan DPRS
 - Mengesahkan UUD 1945
 - Pembentukan departemen dan kementerian RI
 - Pembentukan Tentara Nasional Indonesia
- Kedudukan KNIP sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tampak dari ...
 - Pembentukan KNIP merupakan hasil keputusan PPKI
 - Sebelum ada MPR, KNIP berwenang menetapkan GBHN
 - KNIP dirintis oleh panitia kecil yang dibentuk PPKI

- d. Pembentukan KNIP berdasarkan keputusan presiden
 - e. KNIP memiliki kekuasaan tak terbatas
3. Pembahasan UUD 1945 dalam sidang PPKI tentang bentuk negara Indonesia telah disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara ...
 - a. Republik Serikat
 - b. Yang bentuk negaranya mengikuti bentuk negara Belanda
 - c. Kesatuan yang berbentuk Republik
 - d. Yang mengikuti bentuk negara kekaisaran Jepang
 - e. Kesatuan yang berbentuk Parlementer
 4. Tujuan didirikannya Putera oleh Jepang adalah ...
 - a. Menyelidiki tokoh-tokoh yang menentang Jepang
 - b. Mendidik para pemuda untuk menjadi tentara yang siap membantu Jepang
 - c. Mempersiapkan para pemuda untuk menjadi tenaga yang ahli dalam bidang administrasi
 - d. Membujuk semua kekuatan rakyat agar bersatu untuk membantu Jepang
 - e. Menangkap tokoh-tokoh perjuangan Indonesia
 5. Hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945, yaitu bahwa proklamasi merupakan pengejawantahan isi jiwa bangsa Indonesia, yang artinya proklamasi ...
 - a. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
 - b. Sebagai jembatan emas yang merupakan penghubung untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke masa kemerdekaan
 - c. Menandai berdirinya negara Indonesia dan sekaligus dimulainya sejarah ketatanegaraan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
 - d. Merupakan perwujudan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dengan kehidupan yang bebas menentukan nasibnya sendiri
 - e. Merupakan perwujudan bebas dari Jepang
 6. Suasana sidang PPKI pada saat penyusunan konstitusi pertama didasari dengan semangat ...
 - a. Kebersamaan dan kekeluargaan
 - b. Eksklusivisme
 - c. Individualisme
 - d. Fanatisme
 - e. Heroisme
 7. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diantara keduanya tidak dapat dipisahkan Proklamasi kemerdekaan merupakan *proclamation of independence*, sedangkan Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, merupakan

- h. Declaration of independence
 - i. Declaration of human right
 - j. Rights of legal equality
 - k. Universal declaration
 - l. Universal of human right
8. Di bawah ini merupakan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, kecuali negara ...
 - a. Persatuan
 - b. Berkeadilan sosial
 - c. Berkerakyatan
 - d. Berkedaulatan Rakyat
 - e. Berperikemanusiaan
 9. Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia dibagi menjadi ... provinsi
 - a. 8
 - b. 12
 - c. 15
 - d. 21
 - e. 23
 10. Deklarasi kemerdekaan yang terkandung dalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945, merupakan pernyataan yang bersifat ...
 - a. Lokal
 - b. Universal
 - c. Insidental
 - d. Sementara
 - e. Nasional

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Mengapa Indonesia perlu menyusun tata kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Apa fungsi dari komite nasional Indonesia pusat?
3. Apa tujuan pemerintah RI membentuk BKR dan bukan TKR di awal kemerdekaan?
4. Pembentukan BKR telah menimbulkan reaksi keras dari pada pemuda dan Jepang. Jelaskan bentuk reaksi tersebut!

Operatie Product” (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.

Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah- daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H. J. van Mook menyampaikan pidato radio yang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

A. Dimulainya Operasi Militer

Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama . Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat- obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo.

B. Campur Tangan PBB

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN),

karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Strategi diplomasi ditunjukkan dengan kesediaan Indonesia berunding dengan Belanda. Meskipun pada kenyataannya Belanda selalu mengingkari isi perundingan yang ditandatangani. Belanda justru menyerang wilayah Indonesia. Berikut ini cara-cara diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia dengan Belanda.

C. Perjanjian Linggajati

Perjanjian Linggajati berlangsung di daerah Linggajati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan Belanda diwakili oleh van Mook. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggajati yang ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Merdeka) Jakarta, pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggajati adalah sebagai berikut.

1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Perjanjian Linggajati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda, karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia, serta membentuk negara boneka.

Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah RI. Serangan ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang.

D. Perjanjian Renville

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota KTN dipilih sendiri oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul

van Zeeland. Adapun Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. KTN mengusulkan perundingan diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat "USS Renville". Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Dari pihak Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut.

1. Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Jogjakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra.
2. Tentara Republik Indonesia (TRI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda.

Akibat dari Perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Setelah Perundingan Renville banyak peristiwa penting terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
2. Ibu kota RI dipindahkan ke Jogjakarta, karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda.

Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi pada isi Perjanjian Renville. Dan tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI. Serangan ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Serangan dimulai dengan membom lapangan terbang Maguwo, Jogjakarta. Dalam waktu singkat ibu kota RI Jogjakarta dapat dikuasai Belanda.

Dalam keadaan genting, pemerintah RI memberikan mandat kepada menteri Syafruddin Prawiranegara. Saat itu beliau sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Beliau ditugaskan untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara pada saat yang sama Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pejabat pemerintah ditangkap oleh Belanda. Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka.

Dalam kejadian tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman berhasil meloloskan diri dan meninggalkan ibu kota. Dalam keadaan sakit, Jenderal Soedirman tetap memimpin perang gerilya menghadapi Belanda di segala penjuru Jogjakarta. Serangan Belanda dalam Agresi Militer II mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan, negara-negara di Asia yang simpati pada perjuangan rakyat Indonesia. Misalnya negara India, Myanmar, Afganistan, dan negara lainnya yang mengadakan konferensi di New Delhi. Hasil konferensi tersebut antara lain pemerintah RI segera dikembalikan ke Jogjakarta. Sementara serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Namun demikian, Belanda tidak mempedulikan desakan itu. Pada tang-

gal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang dan mengajukan resolusi. Isi resolusi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menghentikan permusuhan.
2. Pembebasan Presiden Soekarno serta para pemimpin RI lainnya yang ditangkap saat Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.
3. Meminta KTN memberikan laporan lengkap tentang situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948.

E. Perjanjian Roem-Royen

Hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB. Belanda menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan berlarut-larut. Akhirnya Perjanjian Roem–Royen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Royen. Dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merle Cochran. Isi Perjanjian Roem–Royen adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan RI dikembalikan ke Jogjakarta, penghentian perang gerilya dan pembebasan semua tahanan politik.
2. Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Belanda menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
4. Akan diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintahan RI kembali ke Jogjakarta.

Pasukan Belanda akhirnya meninggalkan Jogjakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Kemudian pada 6 Juli 1949 presiden, wakil presiden, dan pemimpin Indonesia lainnya yang ditawan Belanda dibebaskan dan kembali ke Jogjakarta.

F. Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi Perjanjian Roem–Royen bertempat di Den Haag pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Delegasi BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) atau Badan Musyawarah negara-negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. van Maarseveen, sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley. Adapun hasil Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut.

1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949.
2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia–Belanda.
3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan Sesuai hasil KMB, bentuk negara Indonesia adalah serikat. Oleh karena itu, mulailah disusun sistem pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1949, Drs. Mohammad Hatta dilantik menjadi wakil presiden RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Selanjutnya Mr. Asaat dilantik sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI pada 27 Desember 1949.

Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan Jakarta. Di Istana Kerajaan Belanda, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Yuliana dan Drs. Mohammad Hatta. Sementara itu, di Istana Merdeka di Indonesia naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink. Hasil KMB sangat memuaskan rakyat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan usaha Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia tidak berhasil. Dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, berakhir pula kekuasaan Belanda di Indonesia.

PENUGASAN

Dalam penugasan ini, Anda diminta untuk mencari dan mengumpulkan artikel bebas terkait dengan peranan PBB dalam membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian analisislah, sejauh apa peranan bantuan PBB tersebut dalam keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.

1. Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda akan:

- a. Memahami dan mampu mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi serangan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaannya.
- b. Mengetahui secara mendalam peran PBB selaku organisasi Internasional dalam membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.

2. Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

- a. Sumber belajar kredibel berupa buku ataupun artikel internet tentang peranan PBB dalam membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.
- b. Alat tulis
- c. Komputer/laptop (jika ada)

3. Langkah-langkah Kegiatan

Ketika Anda mengerjakan penugasan, lakukanlah langkah-langkah berikut:

- a. Carilah sumber belajar/ artikel tentang peranan PBB dalam membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.
- b. Baca, analisis dan identifikasikan apa saja langkah yang dilakukan PBB dalam membantu Indonesia dan bagaimana hasilnya.
- c. Tuangkan hasil analisismu dalam bentuk makalah sederhana dan presentasikanlah dalam diskusi kelas.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e.

1. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena ...
 - a. Banyak pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya
 - b. Arek-arek Surabaya berhasil membunuh Brigadir Jenderal Mallaby
 - c. Pasukan Inggris mengerahkan pasukan darat dan lautnya untuk menghancurkan kota Surabaya
 - d. Bung Tomo dan kawan-kawan berhasil mengobarkan semangat kepahlawanan pemuda-pemuda Surabaya
 - e. Adanya resolusi jihad
2. Penyebab utama meletusnya pertempuran 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Sekutu (Inggris) adalah ...
 - a. Terbunuhnya Jenderal Mallaby dan diabaikannya ultimatum Sekutu oleh arek-arek Surabaya
 - b. Tewasnya Jenderal Christison
 - c. Tindakan Sekutu yang berusaha menguasai Surabaya dengan kekerasan
 - d. Mendaratnya pasukan Sekutu di Surabaya
 - e. Terbunuhnya tukang becak di sekitar hotel Yamato Surabaya

3. Isi Perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia sebab ...
 - a. Mempersempit wilayah RI dan mengubah tujuan negara
 - b. Mempersempit wilayah RIS dan mengubah tujuan negara
 - c. Mempersempit wilayah NIS dan mengubah tujuan negara
 - d. Mempersempit wilayah NIT dan mengubah tujuan negara
 - e. Mempersempit perjuangan Indonesia
4. Pemimpin pertempuran di Ambarawa pada 21 November sampai 12 Desember 1945 yang berhasil menahan gerak maju tentara Sekutu sehingga harus mundur ke Semarang adalah ...
 - a. TB Simatupang
 - b. A.H. Nasution
 - c. Kolonel Supriyadi
 - d. Urip Sumoharjo
 - e. Jenderal Sudirman
5. Negara netral yang duduk dalam KTN yang bukan ditunjuk Indonesia maupun Belanda adalah ...
 - a. Australia
 - b. Amerika Serikat
 - c. Prancis
 - d. Belgia
 - e. Uni Soviet
6. Tugas pokok Komisi Tiga Negara adalah ...
 - a. Mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda I
 - b. Mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda II
 - c. Melaksanakan Perjanjian Roem-Eoyen
 - d. Membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda
 - e. Melaksanakan perundingan Renville
7. Peristiwa penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta oleh Belanda yang selanjutnya diasingkan ke Prapat dan Muntok terjadi pada saat ...
 - a. Perjanjian Roem-Royen
 - b. Serangan Umum terhadap kota Yogyakarta
 - c. Agresi Militer Belanda I
 - d. Agresi Militer Belanda II
 - e. Perundingan Linggarjati

8. Pada tanggal 13 Juli 1949, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra mengembalikan mandat kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Hal ini merupakan akibat dari ...
 - a. Perundingan Renville
 - b. Perjanjian Roem-Royen
 - c. Perjanjian Inter-Indonesia
 - d. Konferensi Meja Bundar
 - e. Perundingan Linggarjati
9. Berikut ini merupakan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kecuali ...
 - a. PBB membentuk KTN
 - b. PBB membentuk UNCI
 - c. PBB berupaya mencari jalan damai untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda
 - d. PBB langsung menerima Indonesia sebagai anggota setelah merdeka
 - e. PBB langsung menerima Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan
10. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk akibat dari ...
 - a. Agresi Militer Belanda I
 - b. Agresi Militer Belanda II
 - c. Jatuhnya Jakarta sebagai ibu kota RI ke tangan Belanda
 - d. Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948
 - e. Pertempuran 10 November 1945

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Jelaskan peristiwa linggarjati dan apa latar belakangnya!
2. Jelaskan sebab-sebab pelaksanaan agresi militer belanda II!
3. Jelaskan bagaimana terjadinya peristiwa/ perjanjian renville!
4. Jelaskan latar belakang pelaksanaan agresi militer belanda III!
5. Jelaskan sebab-sebab dibentuknya PDRI!

RANGKUMAN

1. Lembaga negara pada awal pemerintahan RI:
 - a. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
 - b. Kabinet RI dan Pembagian Wilayah (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan)
 - c. Badan-Badan Perjuangan dan TNI
 - d. Partai Politik
2. Perkembangan politik pada awal kemerdekaan sampai dengan 1950:
 - a. Perubahan Sistem Presidensial Ke Parlementer (3 November 1945)
 - b. KNIP dengan Lembaga Pemerintahan (14 Oktober 1945)
 - c. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara (5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947)
 - TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada 5 Oktober 1945
 - TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibentuk pada 1 Januari 1946
 - TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dibentuk pada 26 Januari 1946
 - TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibentuk pada 7 Juni 1947
3. Perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta Ke Yogyakarta (Awal di Tahun 1946)
4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif (Awal Tahun 1950)
5. Perjanjian Linggajati berlangsung di daerah Linggajati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan Belanda diwakili oleh van Mook. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggajati yang ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Merdeka) Jakarta, pada tanggal 25 Maret 1947.
6. Operatie Product" (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini oleh Republik Indonesia dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.
7. Perundingan Renville diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat "USS Renville". Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.
8. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi pada isi Perjanjian Renville. Dan tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI. Serangan ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Serangan dimulai dengan membom

UJI KOMPETENSI

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e.

1. Menjelang pelaksanaan proklamasi Indonesia terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pemuda dengan Bung Karno. Alasan Bung Karno tidak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah ...
 - a. Kekuasaan tentara Jepang masih kuat
 - b. Anggota PPKI adalah tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia
 - c. PPKI adalah panitia yang sah untuk melaksanakan proklamasi
 - d. Bung Karno sebagai ketua merasa bertanggung jawab kepada anggota PPKI
 - e. Bung Karno takut terjadi pembantaian terhadap rakyat Indonesia oleh tentara Jepang
2. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengambil keputusan penting yaitu ...
 - a. Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden
 - b. Penetapan susunan kementerian
 - c. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat
 - d. Memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
 - e. Melantik presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
3. Berdasarkan maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan nasional adalah ...
 - a. Tentara Keamanan Rakyat
 - b. Tentara Keselamatan Rakyat
 - c. Badan Keamanan Rakyat
 - d. Tentara Republik Indonesia
 - e. Tentara Nasional Indonesia
4. Karena Ir. Soekarno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera, maka tindakan pertama yang dilakukan pemuda ialah ...
 - a. Mengadakan rapat di Jalan Cikini No. 71
 - b. Menculik Ir. Soekarno untuk diamankan ke Rengasdengklok
 - c. Mengadakan rapat di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur
 - d. Mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1
 - e. Mengadakan rapat di Rengasdengklok

lapangan terbang Maguwo, Jogjakarta

9. Untuk menghentikan agresi militer Belanda PBB membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Perjanjian Roem–Royen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Royen dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merle Cochran.
10. KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi Perjanjian Roem–Royen bertempat di Den Haag pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Delegasi BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) atau Badan Musyawarah negara-negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. van Maarseveen, sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley

5. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok adalah ...
 - a. Adanya ketidakpuasan sikap pemuda terhadap sikap Bung Karno dan Bung Hatta yang menghendaki kedudukan presiden dan wakil presiden
 - b. Perbedaan pendapat antar tokoh tua dan muda mengenai kapan akan dilaksanakan proklamasi
 - c. Kekhawatiran pemuda atas keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta
 - d. Keinginan pemuda untuk segera memproklamsikan kemerdekaan Indonesia di Rengasdengklok
 - e. Keinginan pemuda untuk segera memproklamsikan kemerdekaan Indonesia tanpa melibatkan tokoh-tokoh tua
6. Dalam perundingan Linggajati Indonesia diketuai oleh ...
 - a. Agus Salim
 - b. Soekarno
 - c. Moh. Hatta
 - d. Sutan Sjahrir
 - e. Mas Mansur
7. Salah satu hal yang memicu peristiwa yang terjadi di hotel Yamato di Surabaya adalah ...
 - a. Berkibarnya bendera Belanda di puncak hotel
 - b. Masuknya tentara sekutu melalui ujung Surabaya
 - c. Tewasnya beberapa orang Jepang yang menginap di hotel tersebut
 - d. Letak hotel tersebut berdekatan dengan markas Kompartai
 - e. Tukang becak dibunuh Belanda
8. Dalam melakukan perlawanan terhadap sisa-sisa kekuatan pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta terjadi perebutan kekuasaan pada 26 September 1945 dengan cara ...
 - a. Melakukan perusakan pada pabrik-pabrik milik Jepang
 - b. Melakukan penyerbuan ke kantor-kantor Pemerintahan
 - c. Pegawai pemerintahan mengadakan aksi mogok
 - d. Menyerbu gudang-gudang senjata dan pusat perbekalan
 - e. Penjarahan ke rumah-rumah orang Jepang
9. "Semua hutang Hindia Belanda harus dibayar RIS" merupakan salah satu isi dari ...
 - a. Piagam Jakarta
 - b. Keputusan perundingan KMB
 - c. Maklumat 3 November 1945
 - d. Maklumat Politik No. X Tahun 1945
 - e. Keputusan perundingan Roem-Royen
10. Berakhirnya pertempuran di Semarang melawan Jepang semakin dipercepat dengan kedatangan ...
 - a. Pemimpin Indonesia
 - b. Pemimpin dunia
 - c. Tentara Sekutu
 - d. Tentara Rakyat Indonesia
 - e. Tentara Nasional Indonesia
11. Permasalahan Irian Barat yang ditunda penanganannya selama satu tahun ke depan merupakan isi perundingan ...
 - a. KTN
 - b. KMB
 - c. Linggajati
 - d. Roem-Royen
 - e. Renville
12. Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah "penghentian perang Gerilya" merupakan salah satu isi dari ...
 - a. Rapat KMB
 - b. Misi KMB
 - c. Roem-Royen
 - d. Tujuan KMB
 - e. Renville
13. Dari beberapa perundingan yang telah dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia, pada umumnya hal mendasar yang ditolak oleh pihak Indonesia adalah ...
 - a. Kerjasama Indonesia dan Belanda dalam bidang perdagangan
 - b. Pembentukan parlemen Indonesia di bawah pengawasan Belanda
 - c. Keinginan Belanda berkuasa di Indonesia dengan berbagai dalih
 - d. Bantuan pinjaman modal berjangka dari pemerintah Belanda
 - e. Hibah modal dari pemerintah Indonesia
14. Dokter yang dibunuh Jepang saat memeriksa kepastian sumber air yang diracun bernama ...
 - a. Supriadi
 - b. Kariadi
 - c. Mulyadi
 - d. Ariadi
 - e. Soetomo
15. Untuk lebih memperkuat proses dalam memecah belah RI negara boneka, Belanda membentuk ...
 - a. BFO
 - b. PBB
 - c. AFTA
 - d. OKI
 - e. ASEAN

KUNCI JAWABAN

Unit 1:

A. Pilihan ganda

1. C
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. C
8. D
9. A
10. B

B. Uraian

1. Karena Indonesia harus memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang didukung rakyat
2. Membantu presiden dalam menjalankan tugasnya
3. Indonesia tidak menganut politik perang, dan berusaha menghindari permusuhan dengan kekuatan sekutu dan pasukan Jepang yang ada di Jakarta masih kuat.
4. Mengetahui pembentukan BKR Jepang segera bertindak melucuti senjata para pemuda Indonesia yang bertugas menjaga keamanan umum.

Unit 2:

A. Pilihan ganda

1. D
2. A
3. A
4. D
5. B
6. D
7. B

8. D
9. D
10. B

B. Uraian

1. **Peristiwa** : Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.
Latar belakang : Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
2. Sebab-sebab pelaksanaan agresi militer I adalah pada 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari. Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.
3. Terjadinya peristiwa perjanjian Renville Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.
4. Latar belakang agresi militer Belanda II terjadi karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville dan pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat

disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.

5. Sebab-sebab dibentuknya PDRI : Pada tanggal 19 Desember 1948 sebelum pemerintah Indonesia ditawan maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.
 - a. Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) untuk membentuk PDRI di Sumatera.
 - b. Kepada A.A Maramis, L.N Palar, dan Soedarsono diperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawiranegara gagal di Sumatera.
 - c. Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN. Sesuai dengan instruksi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi maka dibentuklah PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dimana Perdana Menteri merangkap menteri pertahanan dan penerangan dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat oleh A.A Maramis. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI memberikan instruksi lewat radio kepada wakil Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan ini berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati dunia internasional.

Uji Kompetensi

1. A
2. A
3. A
4. C
5. B
6. D
7. A
8. C
9. B
10. C
11. B
12. C
13. C
14. B
15. A

KRITERIA PINDAH MODUL



Daftar Pustaka

- Badrika, I Wayan.2006. *Sejarah Untuk SMA* . Jakarta: Erlangga
Notosusanto, Nugroho et al. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta:Depdikbud
<http://www.perjuangandiplomasi-belanda.com>
<http://www.awalkemerdekaanindonesia-sampaisaatini-penjajahan.com>



Profil Penulis

Nama Lengkap : Sulaiman Hasan, M.Pd.
Lahir : Lamongan, 17 Mei 1972
Telp/Fax : (031) 592 597 2 – 594 510 1
E-Mail : sulaimanhasan720517@gmail.com.
Alamat Kantor : Jl. Gebang Putih 10 Sukolilo, Surabaya
Riwayat Pekerjaan : Pamong Belajar BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :
1997 Sarjana Pendidikan Matematika IKIP Surabaya
2006 Program Studi Teknologi Pembelajaran Pasca Sarjana
Universitas Adibuana Surabaya

Judul Buku & Media :
2006 Media Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Matematika Kejar Paket C tema Bangun Ruang
2008 Penyelenggaraan Kejar paket C dengan Pola SKK (Satuan Kredit Kompetensi)
2009 Pembelajaran Integrasi Vokasi Bidang Pertanian Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C (Pertanian Organik)
2009 Buku Pelajaran Matematika Paket B Tingkatan IV Derajat Terampil II
2015 Bahan Ajar Matematika setara SD Kelas IV dalam rangka Pembelajaran Paket A Pasca Melek Aksara Dengan Sistem Setoran Kompetensi (PASMA-SSK)
2016 Pembelajaran Jarak jauh Paket C
2017 Modul 1 & 2 Sejarah Indonesia Paket C Kelas X
2018 Modul 10 Sejarah Indonesia Paket C Kelas XI

Lainnya :
2005 Anggota tim penyusun naskah lomba dengan judul "Pendidikan Hukum dan Kesehatan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Surabaya" dan berhasil menjadi juara I pada lomba karya nyata pamong belajar tingkat Nasional